

SISTEM LELANG ELEKTRONIK E-KATALOG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Nama Mahasiswa : Suvy Tazkia Al'Arasy
NIM : 212374201050
Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Kuswanto, S.H., M.H.
2. Hj. Rini Winarsih, S.H., M.H.

ABSTRAK

Sistem lelang elektronik (e-katalog) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Penelitian ini menganalisis efektivitas ketentuan hukum e-katalog dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi PBJ, serta pengaruh pembatalan/adendum kontrak terhadap efektivitas sistem dan prinsip pengadaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data dari wawancara pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah, analisis kasus korupsi terkait e-katalog, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-katalog berpotensi meningkatkan efisiensi dan transparansi PBJ, namun terdapat tantangan. Tantangan pertama adalah ketimpangan harga. Meskipun e-katalog menyediakan informasi harga, harga yang tercantum seringkali lebih tinggi dari harga pasar. Hal ini disebabkan oleh penggelembungan harga oleh penyedia, kualitas barang yang tidak sesuai harga, praktik monopoli harga, dan kurangnya pengawasan. Ketimpangan harga dapat menyebabkan pemborosan anggaran negara, kualitas barang kurang memadai, menurunnya kepercayaan masyarakat, dan meningkatnya praktik korupsi. Tantangan kedua adalah pembatalan/adendum kontrak. Pembatalan kontrak dapat terjadi karena keadaan kahar, pelanggaran kontrak, atau kegagalan penyedia. Pembatalan kontrak dapat menghambat efisiensi dan transparansi, serta mempengaruhi akuntabilitas. Regulasi pembatalan kontrak yang memberikan wewenang besar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memutus kontrak dapat memunculkan potensi ketidakadilan bagi penyedia jasa. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian harga melalui pembentukan tim pemantau independen dan pengembangan fitur deteksi anomali harga. Selain itu, diperlukan regulasi yang lebih adil dalam pembatalan dan adendum kontrak, mencakup prosedur yang transparan dan adil bagi kedua belah pihak, serta kebijakan kompensasi bagi penyedia yang dirugikan. Dengan perbaikan ini, efektivitas e-katalog dapat lebih optimal, menjaga prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kata Kunci: E-katalog, pengadaan barang dan jasa pemerintah, efisiensi, transparansi, pembatalan kontrak, adendum kontrak.

ELECTRONIC AUCTION SYSTEM E-CATALOG IN GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Nama Mahasiswa : Suvy Tazkia Al' Arasy
NIM : 212374201050
Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Kuswanto, S.H., M.H.
2. Hj. Rini Winarsih, S.H., M.H.

ABSTRACT

The electronic auction system (e-catalog) in government procurement of goods and services (PBJ) aims to increase efficiency, transparency, and accountability. However, its effectiveness remains a matter of debate. This study analyzes the effectiveness of the e-catalog legal provisions in increasing the efficiency and transparency of the Procurement of Goods and Services, as well as the influence of contract cancellation/adendum on the effectiveness of the procurement system and principles. This study uses qualitative methods with data from interviews with government procurement managers, an analysis of corruption cases related to e-catalogs, and a literature review. The results show that e-catalogs have the potential to improve the efficiency and transparency of procurement, but there are challenges. The first challenge is price inequality. Although e-catalogs provide price information, listed prices are often higher than market prices. This is caused by price inflation by suppliers, inadequate quality of goods, monopolistic pricing practices, and a lack of oversight. Price inequality can lead to waste of state funds, inadequate quality of goods, decreased public trust, and increased corruption. The second challenge is contract cancellation/addendum. Contract cancellation can occur due to force majeure, breach of contract, or provider failure. Contract cancellation can hinder efficiency and transparency, and affect accountability. Contract cancellation regulations that grant extensive authority to the Commitment Making Officer (PPK) to terminate contracts can create potential unfairness for service providers. To address this issue, this study recommends improving the price monitoring and control system by establishing an independent monitoring team and developing a price anomaly detection feature. Furthermore, fairer regulations are needed for contract cancellation and addendums, including transparent and fair procedures for both parties, as well as compensation policies for providers who suffer losses. With these improvements, the effectiveness of the e-catalog can be optimized, maintaining the principle of fair competition in government procurement of goods and services.

Keywords: E-catalog, government procurement of goods and services, efficiency, transparency, contract cancellation, contract addendum.